

PB 10

**STRATEGI UMUM
PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP**

A. Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kependudukan

1. Perkembangan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

a. Menjelang konferensi Stockholm (5 Juni 1972)

- Pertemuan tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran (Menteri Negara PAN, 1971)
- Seminar pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan nasional (UNPAD, 1972)

b. Tindak lanjut konferensi Stockholm

- Perumusan program pembangunan lingkungan hidup dalam GBHN (1993 – sekarang) antara lain pendidikan PKLH secara formal, informal dan non formal
- Terbentuknya Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) pada kabinet Pembangunan III
- Terbentuknya Menteri KLH (Kabinet Pembangunan IV-VI) sampai sekarang
- Terbentuknya Menteri Negara Lingkungan Hidup Kabinet Pembangunan VII dituangkan dalam Agenda 21 Indonesia.

2. Masalah Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Indonesia

a. Perkembangan penduduk dan masyarakat

- Pertumbuhan penduduk cepat dan masyarakat penduduk banyak
- Sebagian besar penduduk (68%) usia muda
- Jumlah pencari kerja banyak (50-60 juta) persebaran penduduk tidak merata
- 80% penduduk hidup dari pertanian sederhana sampai pendapatan rendah
- Kesehatan dan gizi balita rendah → rentan penyakit

b. Perkembangan teknologi dan kebudayaan

- Sebagai negara berkembang: kurang modal + kurang teknologi yang serasi
- Terpengaruh negara maju (padat modal, sedikit tenaga kerja)

c. **Perkembangan ruang lingkup internasional**

- Pengaruh negara maju masih kuat: investasi, pinjaman, transportasi, informasi
- Teknologi produksi dan pola konsumsi tidak memperhitungkan aspek lingkungan
- SDA (terutama yang tidak menyangkut produksi) rusak

d. **Perkembangan SDA dan Lingkungan Hidup**

- Jumlah/kepadatan penduduk menekan SDA
- Timbulnya tanah kritis
- Keterbelakangan pengetahuan lingkungan hidup, mengabaikan lingkungan hidup, kerusakan sumber daya

B. STRATEGI PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP

□ **Berdasarkan hasil konferensi Stockholm tahun 1972 maka Strategi Pengembangan Lingkungan Hidup di Indonesia dituangkan dalam dua kebijakan utama yaitu kebijakan kependudukan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.**

□ **Kebijakan kependudukan antara lain:**

- Jumlah penduduk
- Kualitas penduduk
- Peningkatan dalam pendidikan, kesehatan, kesejahteraan
- Pemukiman penduduk daerah perkotaan maupun pedesaan
- Peningkatan pengetahuan dan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan hidup melalui pendekatan:
 - monolitik
 - integartif

- ❑ **Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:**
 - **Pengelolaan pertanian**
 - **Pertambangan dan industri**
 - **Pendayagunaan kekayaan laut**
 - **Kegiatan penunjang (ilmu, teknologi, peraturan, sanksi)**

- ❑ **Kebijakan tersebut digariskan pelaksanaannya untuk tahap periode pembangunan yaitu dalam Repelita I – VI.**

- ❑ **Untuk strategi pengelolaan dan kebijakan lingkungan hidup mulai Repelita VII hingga 2020 dituangkan dalam Agenda 21 Indonesia.**

AGENDA 21 INDONESIA

A. Agenda 21 Global

- ❑ Sebagai tindak lanjut dari konferensi Stockholm 1972, maka pada bulan Juni 1992 diadakan konferensi Lingkungan Hidup Manusia ke II di Rio de Janeiro Brazil.
- ❑ Konferensi tersebut merupakan konferensi PBB tentang lingkungan dan Pembangunan (The United Nations Conference on Environment and Development = UNCED) yang dikenal pula sebagai Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit).
- ❑ Konferensi tersebut dihadiri oleh 179 negara badan-badan PBB, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, merupakan tonggak sejarah untuk menyatukan pendapat para peserta.
- ❑ Dengan tegas dan jelas dinyatakan bahwa antara pembangunan lingkungan, ekonomi, serta sosial harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang tidak dipisahkan.
- ❑ Konferensi menyadari bahwa komitmen dan kerja sama dunia menjadi sangat penting untuk mewujudkan keberlanjutan perekonomian dan masyarakat yang berwawasan lingkungan.

Dalam konferensi tersebut pemerintah Indonesia telah menyetujui sejumlah kesepakatan, yaitu:

- ❑ Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan yang menekankan keterkaitan antara pembangunan dan lingkungan.**
- ❑ Pernyataan tentang prinsip-prinsip kehutanan yang memberikan landasan kesadaran bahwa hutan merupakan sumber daya penting bagi pembangunan ekonomi, penyerapan CO₂ dan untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan pengelolaan DAS.**
- ❑ Konvensi tentang perubahan iklim: perjanjian ini ditujukan untuk menurunkan emisi CO₂, CH₄ dan GRK lainnya.**
- ❑ Konvensi tentang keanekaragaman hayati ditujukan untuk mencegah kerusakan keanekaragaman hayati serta untuk memperkenalkan dasar-dasar pelaksanaan kerja sama penelitian, informasi, kegunaan dan teknologi untuk sumber daya genetik.**

Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari Dokumen Agenda 21 Global yang berisikan program aksi pembangunan berkelanjutan untuk saat ini dan abad 21

Aksi tersebut timbul dari kesadaran dampak tingkah laku manusia terhadap lingkungan dan untuk berkelanjutan sistem produksi

Tiap negara dapat melakukan penyesuaian dan perubahan yang diperlukan untuk pembangunan sosial ekonomi dan lingkungan hidup

B. Penyusunan Agenda 21 Indonesia

❑ Berdasarkan Agenda 21 Global Indonesia menyusun dokumen Agenda 21 Indonesia yang merupakan strategi nasional menuju pembangunan berkelanjutan.

❑ Tujuan Agenda 21 Indonesia adalah:

- Untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan ke dalam satu paket kebijakan dalam melanjutkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- Memberikan serangkaian pandangan dan inspirasi yang dimasukkan dalam proses perencanaan dan program pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang
- Memberikan seperangkat saran dan rekomendasi bagi penyusunan strategi pembangunan dan penyusunan GBHN.

Cakupan Agenda 21 Indonesia

Bagian I : Pelayanan Masyarakat, meliputi berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas masyarakat, antara lain :

- pengentasan kemiskinan
- perubahan pola konsumsi
- dinamika kependudukan
- pengelolaan dan peningkatan kesehatan
- pengembangan perumahan dan pemukiman
- sistem perdagangan global dan lingkungan terpadu

Bagian II : Pengelolaan Limbah, berisi strategi perlindungan global yang ditimbulkan oleh limbah global dan nasional, meliputi :

- perlindungan atmosfer
- pengelolaan bahan kimia beracun
- pengelolaan limbah B3
- pengelolaan limbah radioaktif
- pengelolaan limbah padat dan cair

Bagian III : Pengelolaan Sumber Daya Lahan, mencakup pengelolaan sumber daya lahan, hutan, pertanian, dan air secara berkelanjutan yang meliputi:

- penatagunaan sumber daya tanah
- pengelolaan hutan
- pengembangan pertanian dan pedesaan
- pengelolaan sumber daya air

Bagian IV : Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang menguraikan strategi untuk melestarikan keanekaragaman hayati, bioteknologi dan sumber daya pesisir dan laut

- konservasi keanekaragaman hayati
- pengembangan bioteknologi
- pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan

Pada setiap program kebijakan tersebut dijelaskan tentang :

- **dasar tindakan yang mengacu pada isue global dan nasional**
- **tujuan yang akan dicapai**
- **kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan**
- **sarana untuk pelaksanaan**

Disamping itu dibahas pula peranan dan sumbangsih kelompok masyarakat Agenda 21 Indonesia merupakan acuan strategi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup hingga periode tahun 2020.